

BAB VI

KESIMPULAN

Penelitian ini menganalisis bagaimana pemerintah daerah dalam mengelola keadaan darurat terkait erupsi Merapi yang akan datang dengan melihat ke dalam struktur dan proses tata kelola jaringan terhadap respon bencana. Artikel ini menganalisis operasi respons jaringan penanggulangan bencana di Daerah istimewa Yogyakarta.

Setelah erupsi Merapi melanda pada tahun 2010 membuat semua instansi pemerintah dan lembaga organisasi kemasyarakatan dan relawan lokal serta masyarakat lokal terus melakukan pembenahan terkait penanggulangan bencana. Justru itu, peneliti tertarik melakukan sebuah riset yang menemukan hal-hal yang baru yang bisa menjadikan sebuah evaluasi dan referensi didalam penanggulangan bencana. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab dua pertanyaan utama: pertama, sampai sejauh mana semua *stakeholders* melakukan kolaborasi didalam penanggulangan bencana erupsi Merapi? apakah struktur jaringan dari sebuah kolaborasi semua *stakeholders* memengaruhi kinerjanya selama tanggap bencana? dan kedua, sejauh mana aspek proses tata kelola (*initial agreement, trust, managing conflict, leadership, planning, existing relationship*) mempengaruhi kinerja semua *stakeholders* di dalam penanganan penanggulangan bencana erupsi Merapi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Penelitian ini menggunakan model penelitian yang kritis menganalisis variabel-variabel yang mendasar dalam lintas sektor manajemen bencana kolaboratif di DIY.

Bryson, Crosby, dan Stone (2006) mendefinisikan kolaborasi lintas sektor sebagai proses "menghubungkan atau berbagi informasi, sumber daya, kegiatan, dan kemampuan oleh organisasi di dua sektor atau lebih untuk mencapai bersama hasil yang tidak dapat dicapai oleh organisasi dalam satu sektor secara terpisah. "

1.1 Ringkasan Hasil

6.1.1 Analisis Struktural dari Jaringan Manajemen Bencana

Hasil deskriptif statistic yang dilakukan menggunakan *Social Network Analysis* (SNA) menggunakan Nodexl mengatakan bahwa ada beberapa organisasi yang mendominasi didalam jaringan dan transaksi dalam mendistribiskan berbabagi informasi terkait penanggulangan bencana. Untuk dari lembaga keorganisasian masyarakat didominasi oleh organisasi Palang Merah Indonesia (PMI) yaitu dengan nilai *degree* 23 untuk *in degree* 22, *outdegree* 11, *betwenness centrality* 203,190, *clonness centrality* 0,032, *eigenvector centrality* 0,088 dan diikuti oleh organisasi kemasyarakatan lainnya yaitu Relawan Lokal, TAGANA, SATGAS, MDMC, PKPU, dll (Lihat Tabel 5.3). Sedangkan untuk Instansi Pemerintah di dominasi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) yaitu dengan nilai *degree* 21 untuk *in degree* 20, *outdegree* 8, *betwenness centrality* 190,205, *clonness centrality* 0,030, *eigenvector centrality* 0,080. Dan dikuti oleh instansi lainnya Dinas Sosial (DINSOS), Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman (BPBD SLEMAN), Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG), TNI/POLRI dan Pekerjaan Umum(PU).

Struktur jaringan Tata Kelola Bencana (*disaster management*) di Daerah Istimewa Yogyakarta dalam konteks Kebencanaan Erupsi Merapi dapat dikatakan berjalan relative cepat dan efektif di dalam penanganan penanggulangan bencana. Hal ini karena dukungan semua *stakeholders* maupun mitra dari *stakeholders* yang bersangkutan memiliki ikatan kordinasi yang kuat antara mitranya. Dalam kinerja teknisnya dapat disimpulkan bahwa lembaga organisasi kemasyarakatan seperti PMI justru lebih aktif melakukan kolaborasi dengan semua stakeholders ataupun masyarakat lokal. ini disebabkan, karena lembaga organisasi kemasyarakatan didalam penanganan penanggulangan bencana bersifat indpenden tanpa terikat dengan peraturan apapun. Maka dari itu, biasanya lembaga organisasi kemasyarakatan akan lebih cepat merespon tanpa harus menunggu surat keputusan atau surat perintah dari kepala daerah yang mempunyai wewenang walaupun begitu lembaga kemasyarakatan tetap harus berkordinasi dengan komando yang dikordinir oleh penanggulangan bencana seperti Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD). Sedangkan, lembaga pemerintah biasanya bersifat formal sehingga semuanya dilakukan atas dasar perintah atau keputusan oleh pejabat yang memiliki wewenang.

6.2 Disaster Governance Process

Hasil data deskriptif yang dilakukan pada pembahasan ini menggunakan Analisis smart PLS. Smart PLS merupakan analisis yang dilakukan untuk melihat dan mengetahui pola hubungan antar variable dengan melihat hubungan penting dari kondisi awal (*Previous Performance*), aspek proses tata kelola (*Governance Process*) yaitu perjanjian awal (*Initial Agreement*), kepemimpinan (*Leadership*),

kepercayaan (*Trust*), perencanaan (*Planning*) dan pengelolaan konflik (*Managing Conflict*) dan hasil kolaborasi dalam hal hubungan dengan konstituensi politik dan professional (*Existing Relationship*). Dengan demikian, hubungan liner dari variable dapat diuji. Hasil hipotesa yang diberikan dari analisis smart PLS yaitu bisa dilihat dari rekapan data dibawah ini :

Tabel 6.1 Rekapan data hipotesa variabel yang diuji

<i>Intial Agreement- Existing Relationship</i>	<i>Rejected</i>
<i>Intial Agreement-Leadership</i>	<i>Accepted</i>
<i>Intial Agreement-managing conflict</i>	<i>Rejected</i>
<i>Intial Agreement-planning</i>	<i>Rejected</i>
<i>Intial Agreement-Trust</i>	<i>Rejected</i>
<i>Leadership-Existing Realtionship</i>	<i>Rejected</i>
<i>Leadership-Managing Conflict</i>	<i>Rejected</i>
<i>Leadership-planning</i>	<i>Rejected</i>
<i>Leadership-trust</i>	<i>Accepted</i>
<i>Managing Conflict- Existing Relationship</i>	<i>Rejected</i>
<i>Managing Conflict-Planning</i>	<i>Accepted</i>
<i>Previous Performance-Existing Relationship</i>	<i>Rejected</i>
<i>Previous Performance-Intial Agreement</i>	<i>Accepted</i>
<i>Previous Performance-Leadership</i>	<i>Accepted</i>
<i>Previous Performance-Managing Conflict</i>	<i>Accepted</i>
<i>Previous Performance-Planning</i>	<i>Rejected</i>
<i>Previous Performance-Trust</i>	<i>Rejected</i>
<i>Planning-Existing Relationship</i>	<i>Rejected</i>
<i>Trust-Existing Relationship</i>	<i>Rejected</i>
<i>Trust-Managing Conflict</i>	<i>Rejected</i>
<i>Trust-Planning</i>	<i>Accepted</i>

Sumber : Data primer diolah peneliti (Prawira,2019)

Berdasarkan tabel 6.1 diatas, bahwa untuk hasil uji hipotesa variabel independent dan dependent bahwa hanya ada 7 (Tujuh) variabel yang di terima atau berpengaruh signifikan yaitu *Intial Agreement-Leadership*, *Leadership-trust*, *Managing Conflict-Planning*, *Previous Performance-Intial Agreement*, *Previous Performance-Leadership*, *Previous Performance-Managing Conflict*, *Trust-*

Planning. Variabel ini memiliki nilai statistik yang lebih tinggi dari kriteria pada T Statistics adalah $>1,96$ dan memiliki nilai lebih rendah dari kriteria standard P Values adalah $<0,05$.

Penjelasan Pertama, Temuan mengungkapkan bahwa kinerja jaringan sebelumnya (*Pervious Performance*) secara signifikan terkait dengan perjanjian awal (*Intial Agreement*), kepemimpinan (*Leadership*) dan mengelola konflik (*Managing Conflict*) yang memvalidasi teori Bryson, Crosby dan Stone (2006) bahwa kegagalan sektor memfasilitasi kolaborasi lintas sektor dalam hal meningkatkan perjanjian awal jaringan. sebagai cara untuk menebus kekurangan sektor tertentu. Temuan Ojo dan Abolade (2014) juga didukung karena mereka menekankan bahwa sistem manajemen konflik berdasarkan kinerja sebelumnya memastikan lingkungan yang kondusif dalam proses kolaborasi. Pelajaran dari kegagalan sektor berfungsi sebagai dasar untuk meningkatkan perjanjian informal dan formal dalam kolaborasi serta meningkatkan mekanisme motivasi yang tersedia (Bryson, Crosby dan Stone, 2015). Dengan melakukan hal itu, kepemimpinan dalam jaringan memiliki potensi yang lebih besar untuk berkembang.

Kedua, Hubungan signifikan dari perjanjian awal (*Intial Agreement*) dalam hal altruisme dan keinginan untuk meningkatkan legitimasi organisasi dengan kepemimpinan (*Leadership*) dalam jaringan manajemen bencana mendukung studi sebelumnya dari Lawrence dan Lorsch (1967), Kapucu (2006); Ansell dan Gash (2008); dan Tang dan Tang (2014). Dalam konteks manajemen bencana, manajer publik diharuskan memiliki kemampuan untuk menilai

kerusakan dengan cepat, memulihkan jalur komunikasi yang terganggu, memanfaatkan pengambilan keputusan yang fleksibel dan tidak seperti biasanya, dan memperluas koordinasi dan kepercayaan lembaga-lembaga respon darurat (Kapucu dan Van Wart, 2008). Komunikasi yang buruk, salah arah dan kepemimpinan yang dijalankan dengan buruk oleh pemerintah. Serta koordinasi yang tidak memadai dengan berbagai pemangku kepentingan dan juga kurangnya persiapan di antara masyarakat menyebabkan kegagalan kolaboratif (Menzel et al., 2006; Walters dan Kettl 2005; Wise, 2006). Oleh karena itu, temuan penelitian ini mendukung teori Lawrence dan Lorsch (1967) dalam memahami manajemen bencana kolaboratif yang mengarah pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku manajer publik seperti sifat tugas yang dilakukan, dan mekanisme motivasi dilembagakan dalam jaringan.

Selanjutnya keempat, penelitian ini mengungkapkan bahwa mengelola konflik (*Managing Conflict*) dalam hal gaya pribadi dan proses resmi secara signifikan terkait dengan perencanaan (*Planning*) kolaboratif. Bryson et al (2006) menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi keberlanjutan proses kolaborasi: jenis kolaborasi, ketidakseimbangan kekuatan di antara anggota, dan bersaing untuk logika kelembagaan dalam kolaborasi. Studi ini mendukung temuan Huxham dan Vangen (2005) bahwa ketidakseimbangan kekuatan di antara mitra yang berkolaborasi menyebabkan ketidakpercayaan dan memiliki kecenderungan untuk memburuk dalam kasus kesulitan di antara mitra dalam menyetujui tujuan bersama tetapi dengan taktik seperti perencanaan strategis dan pengembangan skenario. kolaborasi kemungkinan akan berhasil (Bryson et.al 2006).

Kelima, secara signifikan, data menunjukkan bahwa kepercayaan (*Trust*) dalam hal ketergantungan dan kompetensi secara signifikan terkait dengan perencanaan (*Planning*) kolaboratif. Temuan ini menunjukkan bahwa ketika ketergantungan dan kompetensi jaringan ditingkatkan oleh kepemimpinan, maka kepercayaan memperkaya proses perencanaan dan hasil. Temuan ini tidak sepenuhnya setuju dengan temuan Lester dan Krejci (2007) yang mendalilkan bahwa proses perencanaan harus diikuti oleh para pemimpin lembaga yang terlibat dalam operasi bencana untuk memastikan hasil yang sukses.

Terakhir, Selain itu, temuan menunjukkan bahwa kepemimpinan (*Leadership*) secara signifikan terkait dengan motivasi dalam perjanjian awal (*Initial Agreement*), kepemimpinan (*Leadership*) memperluas kepercayaan (*Trust*) dalam proses tata kelola. Umumnya, kepercayaan mengacu pada kepercayaan seseorang dalam keandalan orang lain sehubungan dengan hasil tertentu sementara kepercayaan bersama yang dimiliki oleh anggota organisasi disebut kepercayaan antar organisasi (Giddens 1990, Zaheer et al. 1998, dan Rashid dan Edmondson, 2011). Saling ketergantungan antara lembaga dan organisasi melalui proses interaktif seperti dialog tatap muka meningkatkan kepercayaan, membangun modal sosial dan ini dapat berkembang menjadi budaya kolaboratif yang secara substansial meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan dapat mengarah pada kolaborasi yang sukses (Ansell dan Gash, 2008, Mazmanian dan Tang, 2009; Paraskevopoulos, 2010; Kapucu, Arslan, & Demiroz, 2010; Emerson et al., 2012; Shaw dan Goda, 2004; dan Shimada, 2015). Operasi respons yang efektif membutuhkan kolaborasi dan kepercayaan antara lembaga

pemerintah di semua tingkatan dan antara sektor publik dan nirlaba (Kapucu, 2015). Penelitian ini menemukan bahwa kapasitas manajer publik dalam hal kreativitas dan inovasi, kolaborasi, motivasi dan pemberdayaan orang-orang yang meningkatkan kompetensi dan ketergantungan dalam jaringan mendukung gagasan Fountain (2013) bahwa kepemimpinan strategis terutama keterampilan hubungan diperlukan karena banyak strategi, prioritas, dan tujuan pemerintah secara inheren terletak di seluruh lembaga.

6.3 Deskriptif Analisis Modal Sosial didalam Penanggulangan Bencana Erupsi Gunung Merapi

Pembahasan untuk menguji modal sosial didalam penanggulangan bencana. Peneliti menggunakan teori Dudwick et al. (2006) dalam mengukur enam dimensi modal sosial: 1.kelompok dan jaringan (*groups and networks*), 2. kepercayaan dan solidaritas (*trust and solidarity*), 3. tindakan bersama dan kerja sama (*collective action and cooperation*), 4. informasi dan komunikasi (*information and communication*), 5. kohesi sosial dan inklusi (*social cohesion and inclusion*), dan 6. pemberdayaan dan tindakan politik (*empowerment and collective action*).

Temuan yang didapatkan bahwa pasca terjadinya erupsi merapi tahun 2010 justru memberikan dampak positif bagi warga sekitar. Pada dasarnya, kesadaran untuk membentuk suatu komunitas mulai tumbuh dikalangan masyarakat lokal yang terdampak merapi. ada beberapa desa yang telah melakukan pengorganisasian pemuda tanggap bencana adalah kepulharjo, Turgo

Pengorganisasian peran pemuda dalam pengurangan risiko bencana di Desa Kepuharjo dan Turgo diposisikan sebagai bentuk kerja bersama secara kolaboratif antara tokoh pemuda itu sendiri ataupun organisasi pemuda, masyarakat yang didampingi, dunia swasta/usaha, dan pemerintah dengan tujuan utama untuk mewujudkan masyarakat yang tangguh dan aman terhadap ancaman bencana.

Penduduk sekitar Merapi membentuk komunitas seperti Pasak Merapi dan Lingkar Merapi, SKSB, PL palem dan Gema Merapi. Di desa-desa sekitar Merapi juga punya kader-kader Karang Taruna dan sesepuh yang berperan dalam mitigasi erupsi Merapi. Mereka punya desa siaga, desa bersaudara, dan komunikasi radio siaga. Untuk Desa Turgo, Desa bersaudara adalah desa untuk menampung penduduk yang mengungsi ketika erupsi. Warga yang tinggal di sekitar Merapi, sudah menerapkan mitigasi berbasis komunitas sejak 2007. Mereka punya sistem wajib latih penanggulangan bencana. Kader-kader ini antara lain aparat pemerintah dan tokoh-tokoh desa. Penduduk sekitar Gunung Merapi juga aktif ronda malam. Beberapa dari mereka membangun pos ronda dan berjaga sambil bertukar informasi melalui *handy talkie*. kemudian warga desa menghimpun pemuda di sekeliling Merapi dan memelopori terbentuknya Paguyuban Masyarakat Gunung Merapi (Pasag Merapi) pada 1995. Paguyuban ini bertugas memantau aktivitas Merapi secara rutin dan berbagi informasi antar-anggota. Pasag Merapi kemudian berkembang menjadi komunitas relawan yang bekerja membantu dan melatih masyarakat untuk tanggap bencana. Komunitas ini memiliki sedikitnya 600 relawan bersertifikat mitigasi bencana yang tersebar di empat kabupaten. Dan pada 2002, berdiri stasiun radio Lintas Merapi FM di Desa

Sidorejo, Kecamatan Kemalang, Klaten, yang menjangkau sedikitnya 9.000 pendengar. Melalui radio ini, informasi resmi BPPTKG *real time* bisa langsung disiarkan kepada masyarakat, sehingga memotong jalur birokrasi informasi. Lintas Merapi teruji ketika erupsi pada 2006 dan 2010. Radio komunitas ini menyiarkan informasi dari BPPTKG kepada penduduk tentang aktivitas vulkanik dan zona berpotensi terdampak bencana.

Sedangkan untuk Desa Kepuharjo, Peran kolaboratif pemuda yang tergabung dalam SKSB berfungsi sebagai sosialisasi dan pelatihan pengurangan risiko bencana, selain itu dengan adanya pengorganisasian peran pemuda ini dirasakan akan memberikan dampak positif karena mempunyai akses yang lebih mudah dan dekat dengan pemerintah desa. Selain berfungsi sebagai mobailisasi pemberdayaan masyarakat juga sebagai penyaluran informasi. Penyaluran informasi sendiri dilakukan oleh SKSB melalui HT . HT memberikan informasi yang sangat jelas melalui bunyi frekuensinya yang ditimbulkan dari HT tersebut. Dimana ketika bunyi dari frekuensi HT terdengar lurus tanpa hambatan bisa dipastikan gunung merapi dalam setatus aman. Namun sebaliknya jika frekuensi dari bunyi HT dirasa putus- putus maka bisa jadi bahaya dari merapi akan segera tiba. Ketika mengamati aktivitas yang membahayakan, maka anggota SKSB langsung menyebarkan keadaan tersebut melalui HT ke dalam dua jalur. Jalur yang pertama melakukan pelaporan kepada dinas atau instansi yang terkait yaitu BPBD Sleman sehingga dapat diketahui tindakan apa yang tepat untuk segera dilakukan. Jalur yang kedua memberi peringatan langsung kepada masyarakat melalui anggota yang tersebar di seluruh desa, oleh karena itu HT menjadi alat

wajib yang harus dimiliki oleh setiap dusun dan mayoritas pemuda sudah mempunyai HT. Tujuan dari HT ini juga untuk meminimalisir korban

Untuk radio gema merapi berfungsi sebagai pembuatan jingle radio, dan memproduksi Disaster Management Audio Material Program. Program ini menceritakan kembali ingatan masyarakat tentang merapi baik bencana maupun kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan merapi yang diproses menjadi audio sehingga dapat dinikmati melalui siaran radio. Selain itu ada juga pemulihan terhadap desa yang pernah terdampak erupsi merapi dengan kegiatan trauma healing.

Selanjutnya, konservasi dan pelestarian. Bentuk peran pemuda yang lain adalah konservasi dan pelestarian yang menjadi fokus utama dari FPL Palem. Konservasi dan pelestarian lereng Merapi menjadi hal yang sangat penting pasca erupsi Merapi yang membuat seluruh lahan hijau dan pohon-pohon keras hilang seketika, sehingga dapat memicu bencana sekunder yaitu kekeringan dan angin kencang.

Ini artinya bahwa komunitas ini terbentuk karena asas kemanusiaan dan kesukarelawanan. Selain itu komunitas ini terbentuk karena adanya kohesi sosial, kepercayaan dan solidaritas. Selain itu, komunitas ini terbentuk karena adanya kelompok yang aktif dalam membuat jaringan atau basis masa sehingga menimbulkan dampak yang positif yaitu informasi yang aktual kepada masyarakat lokal. pemberdayaan dan tindakan politik juga terlepas dari terbentuknya komunitas tanggap bencana ini seperti dukungan dari pemerintah dan semua

stakeholders terkait dalam memberikan pelatihan dan pemberdayaan kepada masyarakat lokal.

6.2 Saran

Berdasarkan hasil dari ringkasan analisis diatas, bahwa Karakteristik dilingkungan kelembagaan dirasa perlu untuk mengatasi masalah publik. Yaitu dengan melalui kolaborasi yang baik antara stakeholder dan mitra dari stakeholder. Dibutuhkan komitmen bersama untuk menjalankannya, agar kolaborasi bisa dijalankan dan semua *stakeholders* bisa saling diuntungkan. Jika melihat hasil dari variabel-variabel yang diuji maka dibutuhkan perencanaan yang matang, serta menjalankan manajemen konflik yang tersusun secara sistematis. Selain itu, kepercayaan juga perlu didalam penanggulangan bencana, kepercayaan akan memberikan pengaruh positif kepada semua *stakeholders* dan anggota mitra didalam melaksanakan penanggulangan bencana. Ini juga, tidak terlepas dari kepemimpinan sangat mempengaruhi didalam setiap penanggulangan bencana, diharapkan kedepannya siapapun yang memimpin didalam penanggulangan bencana semua itu didasarkan atas kesukarelawan dan kemanusiaan sehingga tidak menimbulkan keegoisan suatu instansi dan institusi.

Dibutuhkan hubungan yang erat antar *stakeholders* dan mitra dimana didalam perjanjian awal atau kinerja sebelumnya harus ada regulasi yang kuat serta ketika ada suatu lembaga yang memiliki pengaruh yang besar. maka, diharapkan dapat diberikan suatu penghargaan dan insentif bagi lembaga yang berhasil atau memiliki prestasi didalam penanggulangan bencana.